



Inovasi Kurikulum

<https://ejournal.upi.edu/index.php/JIK>



Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pariwisata

Woro Priatini

Universitas Pendidikan Indonesia

woro.priatini@upi.edu

Abstrak

Sektor pariwisata menghasilkan devisa bagi negara. Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan. Demikian pula, sektor pendidikan mempunyai kondisi yang sama. Untuk itu, perlu dilakukan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kepariwisataan memiliki kompetensi meliputi Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan Keprofesian Guru. Kegiatan akademik semester pertama lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, presentasi hasil pengembangan perangkat pembelajaran, dan *peer-teaching*, serta pendalaman atau penguatan materi bidang studi/keahlian. Kegiatan akademik semester kedua berupa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan bagi PPG kejuruan ada kegiatan praktik di industri. Dengan program tersebut, diharapkan PPG Pariwisata memberikan penguasaan pedagogik, dan program keahlian khusus kepariwisataan.

Kata Kunci: Guru Pariwisata; Pariwisata; Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Abstract

The tourism sector generates foreign exchange for the country. In its development, there are a number of challenges and obstacles. Likewise, the education sector has the same conditions. For this reason, it is necessary to carry out a Tourism Professional Teacher Education (PPG) program that has competencies covering attitudes, knowledge and professional skills of teachers. The academic activities of the first semester are workshops on developing learning tools, presentations of the results of developing learning tools, and peer teaching, as well as deepening or strengthening material in the field of study/skills. The second semester academic activities are in the form of Field Experience Practice (PPL), Classroom Action Research (PTK), and for vocational PPG, there are practical activities in industry. With this program, it is hoped that PPG Tourism will provide pedagogic mastery and special tourism expertise programs.

Keywords: Pendidikan Profesi Guru (PPG); Tourism; Tourism Teacher

PENDAHULUAN

Pariwisata Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa non migas. Bidang ini sangat mumpuni, ditunjang oleh kekayaan budaya lokal, alam yang indah, penduduk yang ramah. Oleh karena itu sangat tepat jika dikatakan pariwisata berbasis kebudayaan lokal, menjadi modal pembangunan masa depan. Indonesia saat ini menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan, bahkan *core business* Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut maka para pemangku kepentingan dalam kepariwisataan membutuhkan sinergi dan integrasi yang sangat baik.

Perlu juga dicermati, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi tantangan Indonesia untuk bisa mencetak para lulusan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga harus mampu menciptakan tenaga-tenaga handal di bidang pariwisata. Dalam sela-sela kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia hingga akhir Agustus 2017 tumbuh sebesar 25,67 %. Pertumbuhan angka kunjungan ini mengalahkan dua negara lain nya di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura yang naik 3,83% dan Thailand naik 5,05%. Berdasarkan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara tersebut Indonesia mendapatkan nilai devisa dari sektor pariwisata sebesar angka US\$17,05 miliar sampai akhir 2017 dari tahun sebelumnya US\$13,57 miliar, dengan melihat tren ini sektor pariwisata di gadang – gadang mampu mengalahkan divisa yang dihasilkan oleh sektor minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) (Gumelar, 2017). Selain itu ditambah juga dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa "Wisata paling banyak angkut tenaga kerja, tetapi memang perlu perubahan kultur masyarakat. Perlu perubahan kultur masyarakat karena pada dasarnya masyarakat harus mampu melayani wisatawan yang datang ke kawasan itu. Saya berharap tokoh masyarakat, agama dan adat bisa memberi pengarahannya kepada masyarakat," (Salim, 2016).

Melihat peluang dan tantangan yang ada kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata yaitu sebanyak 707.600 orang namun hingga kini lulusan SMK Pariwisata tercatat sebanyak 82.171 orang saja, Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian Pariwisata bekerja sama melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing SDM Indonesia, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki program pariwisata untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor pariwisata. Beberapa hal yang dilakukan oleh Kemendikbud di antaranya melakukan penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualitas guru serta sarana dan prasarana dan menyelenggarakan *workshop* dengan tema "Industri Perhotelan 2020 dan Persiapan SMK Go Asia Tenggara" (Setiawan, 2017). Namun dalam perjalanan ada masalah. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, ada 4 kelemahan SMK yang direkomendasikan oleh UNESCO. Pertama siswa SMK tidak percaya diri, kedua personal *leadership*-nya payah, ketiga dalam berkomunikasi tidak bagus dan keempat penguasaan bahasa Inggris juga payah.

Indonesia masih kekurangan 69.389 guru produktif dengan keahlian khusus untuk mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pasalnya, program guru keahlian ganda yang digulirkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ini baru bisa mencetak sebanyak 22.472 guru, sedangkan total kebutuhan sebanyak 91.861 orang. Program tersebut didesain untuk satu tahun dan akan habis pada 31 Desember 2017 (Seftiawan, 2017).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru memiliki tugas, kompetensi, dan tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai seorang guru profesional. Guru dikatakan profesional apabila memiliki kepribadian dan kompetensi profesional (Darmadi, 2015). Untuk memperoleh kompetensi tersebut diperlukan suatu upaya bagi calon guru agar dapat memenuhi kompetensi tersebut dan menjadi seorang guru profesional.

Kompetensi guru menjadi sesuatu yang penting dan dapat mempengaruhi kinerja guru itu sendiri (Zuhriyah, 2016), terlepas dari kompensasi dan motivasi kerja yang juga dapat mempengaruhi kinerja guru (Syamra, 2016). Tanpa kompetensi sebagai seorang guru, siswa tidak akan tertangani dengan baik sehingga guru yang berkualitas dan berkompoten menjadi sesuatu yang mutlak yang harus disiapkan dalam aspek pendidikan. Kompetensi ini digambarkan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus menjadi bagian dari keseharian seorang guru dalam menjalankan tanggung jawab dan peran sebagai seorang guru (Lase, 2016).

Profesi guru adalah sebuah predikat jabatan yang profesional. Profesional diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memenuhi standar tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dipaparkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen di mana profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Begitupun dengan menjadi seorang guru. Untuk menjadi guru, calon guru harus menyelesaikan S1 dan selanjutnya menempuh pendidikan profesi dan mendapatkan sertifikat pendidik seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru di mana Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi khususnya pada pasal 17 ayat (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pada poin ini pendidikan profesi dijelaskan sebagai pendidikan lanjutan di mana pendidikan profesi ini ada untuk menyiapkan tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus. Untuk mengikuti pendidikan profesi ini baru dapat dilaksanakan setelah mengikuti pendidikan tinggi kesarjanaaan.

SMK sebagai sekolah yang dituntut untuk mempersiapkan lulusan yang siap bekerja, harus memiliki guru-guru yang berkompoten pada bidangnya. Untuk menjamin profesionalisme tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan berupaya untuk mendapatkan sertifikat pendidik dengan

mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk mencetak guru SMK salah satunya untuk SMK Pariwisata, maka guru-guru di SMK Pariwisata tersebut harus mengikuti prosedur yang sudah disyaratkan dalam undang-undang atau regulasi yang terkait. Pendidikan profesi dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK). LPTK adalah lembaga yang berwenang untuk mengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pendidikan guru SMK Pariwisata di Indonesia, dilaksanakan oleh LPTK, yaitu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung. Pelaksanaan Pendidikan Profesi guru SMK Pariwisata baru sekali dilaksanakan, yaitu pada tahun 2017. Artikel ini berusaha untuk mengkaji mengenai pelaksanaan PPG untuk guru SMK Pariwisata di Indonesia sehingga diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana PPG ini berperan dalam menyiapkan Guru untuk SMK Pariwisata yang profesional.

TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata dan Kepariwisataan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi-disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pariwisata dan kepariwisataan ini merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik. Untuk menyiapkannya maka perlu dukungan dari berbagai sektor termasuk pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memahami potensi-potensi kepariwisataan di Indonesia.

Keberadaan potensi pariwisata di Indonesia bukan tanpa hambatan dalam pengembangannya. Kementerian Pariwisata setidaknya menjabarkan beberapa hambatan yang dihadapi yakni (1) kurangnya konektivitas, pelayanan dasar, dan infrastruktur untuk melayani wisatawan; (2) Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis; (3) Kebersihan dan kesehatan (*hygiene and sanitation*); (4) Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan ditutupnya pintu masuk ke Indonesia; (5) Kurangnya penerbangan langsung dari target pasar ke destinasi wisata; (6) Kurang baiknya amenities di destinasi wisata, misalnya ketiadaan kamar kecil; (7) Jauhnya jarak antar obyek wisata; (8) Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing, khususnya selain bahasa Inggris; (9) Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata yang belum merata di seluruh provinsi di Indonesia; (10) Kualitas pendidikan tinggi bidang pariwisata diupayakan setara dengan kualifikasi internasional; dan (11) Terbatasnya tenaga kerja terampil dan standar kualitas perusahaan. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya pada 2016 lalu (Prodjo, 2016).

Jika dilihat dari hambatan dan tantangan sektor pariwisata di atas, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mencetak guru-guru SMK Pariwisata yang profesional. Selain menjawab permasalahan

guru, yang berkenaan dengan *shortage*, *unbalanced distribution*, *under qualification*, *low competence* dan *missmatched*. Akan menjawab hambatan dan tantangan dari sektor pariwisata, yang dipaparkan sebelumnya.

Pendidikan Profesional Guru SMK Pariwisata

Sertifikat Pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Program pendidikan profesi sebagaimana hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 baik untuk jurusan pendidikan ataupun non-kependidikan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Zulfitri et al., 2019). PPG ini digambarkan sebagai program yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam memilih dan menguasai segala aktivitas pembelajaran, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran (Supriana & Sukmana, 2018) serta memberikan ilmu baru dalam lingkup kompetensi pedagogik dan profesional (Kisrianto & Iriani, 2018).

Dalam kaitannya dengan program Pendidikan Profesi guru SMK Pariwisata, Dengan melihat minimnya jumlah guru yang ada di wilayah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat beberapa program afirmasi di antaranya program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T), Guru yang bertugas di daerah khusus, program Guru Garis Depan (GGD), program Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru SMA/SMK (Program Keahlian Ganda), program Diklat Berjenjang bagi Pendidik PAUD serta program Pemberian Subsidi Bantuan Pendidikan Konversi GTK PAUD dan DIKMAS (Warta Ekonomi, 2017).

Kemenristekdikti (2017) dalam panduan penyelenggaraan program PPG menyebutkan bahwa guru-guru yang mengikuti Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), (3) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), (4) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*missmatched*).

Berkaitan dengan penyelenggaraan PPG, kurikulum yang disusun menjadi tulang punggung atau acuan agar program tersebut, berjalan sesuai tujuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 ayat 19 mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut, kurikulum menjadi salah satu acuan yang mengarahkan suatu kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah dirancang.

Ornstein & Hunkins (2014) mengemukakan lima definisi dasar tentang kurikulum, antara lain (1) *Curriculum can be defined as a plan for achieving goals*, (2) *Curriculum can be defined broadly as dealing with the learner's experiences*, (3) *Curriculum is a system for dealing with people*, (4) *Curriculum can be defined as a field of study with its own foundations, knowledge domains, research, theory, principles and specialists*, dan (5) *curriculum can be defined in terms of subject matter (math, science, english, history, and so on) or content (the way we organize and assimilate information)*. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai materi pelajaran atau konten, termasuk cara kita mengatur dan mengasimilasi informasi.

Sebagaimana diketahui bahwa kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan, sebagaimana kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi mencapai tujuan-tujuan pendidikan (Sukmadinata, 2013). Peran guru dalam implementasi kurikulum, guru menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun bahan pelajaran, yang sesuai dengan kebutuhan minat dan tahap perkembangan anak, memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi, serta menyusun program dan alat evaluasi yang tepat. Disebutkan pula bahwa implementasi kurikulum hampir seluruhnya bergantung pada kreativitas, kecakapan, kesungguhan dan ketekunan guru (Sukmadinata, 2013).

METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan studi literatur. Bahan kajian di dapat dari sejumlah buku sumber, hasil penelitian dan dokumen negara berupa regulasi yang mendukung. Literatur tersebut berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini. Selain itu, dalam artikel ini, penulis melakukan pengamatan pada saat pelaksanaan program PPG pariwisata. Penelitian menggunakan metode *library research* peneliti memerlukan kehati-hatian agar informasi dan dokumen yang diperoleh untuk mendukung penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Allen, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pendidikan Profesi Guru memiliki dua pola kurikulum yang dapat dipilih oleh LPTK penyelenggara yaitu pola blok dan pola-non blok PLP-S1 merupakan wahana mengaktualisasikan kompetensi akademik, baik penguasaan terhadap keilmuan bidang pedagogi maupun bidang studi yang meliputi 10 aspek, di antaranya tahap kegiatan PLP, mahasiswa, dosen, guru (dosen luar biasa), supervisor, ujian PLP, pengujian, komponen penilaian, kelulusan, dan sekolah mitra (Ningrum, 2012).

Kurikulum Program PPG Pariwisata dirancang dengan masa studi selama 2 semester, beban SKS 36 sampai dengan 38 SKS. Dalam program PPG, mata kuliah dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain kuliah pematapan akademik, lokakarya, seminar, praktik, dan praktik lapangan. Setelah menempuh Program Pendidikan Profesi Guru Program (PPG) Studi Kepariwisata ini peserta pelatihan diharapkan memiliki kompetensi meliputi Sikap, Pengetahuan Dan Keterampilan Keprofesian

Guru. Berdasarkan Silabus Mata Kegiatan PPG Pariwisata UPI (2017), berikut Mata kuliah Program Keahlian Kepariwisata:

1. Kompetensi sikap meliputi: Mencakup sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; menjunjung nilai kemanusiaan, Dapat bersosialisasi dengan masyarakat beragam; menghargai perbedaan pandangan; menjunjung tinggi nilai, etika dan norma masyarakat setempat; serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya, dan menunjukkan sikap terpercaya (berintegritas), Tanggung jawab (responsi), profesional (profesional) sesuai dengan Kode etik pariwisata (*Global Code Ethic of tourism*), dan berkepribadian Indonesia.
2. Kompetensi pengetahuan meliputi: Menganalisis Dasar-dasar Kepariwisata, menganalisis K3 dalam industri pariwisata, menganalisis komunikasi Efektif untuk bekerja dalam tim/kolega dan Literasi Pariwisata, menganalisis industri MICE, menganalisis dokumen Administrasi Usaha Perjalanan Wisata, menganalisis pemesanan tiket dan perhitungan tarif penerbangan, menganalisis pengelolaan perjalanan wisata, menganalisis peranan *tour guide/* pemandu wisata, menganalisis layanan *reception/front desk (pelayanan check in & check out)*, menganalisis pelayanan pemesanan kamar/*Reservation Service*, menganalisis layanan *housekeeping*, menganalisis pelayanan *F&B service*, menganalisis pelayanan *F&B product*.
3. Kompetensi keterampilan khusus meliputi; Mengonstruksi dasar-dasar Kepariwisata, menerapkan K3 dalam industri pariwisata, menerapkan komunikasi Efektif untuk bekerja dalam tim/kolega dan literasi pariwisata, mengonstruksi industri MICE, Melaksanakan pengurusan dokumen Administrasi Usaha Perjalanan Wisata, melaksanakan prosedur pemesanan tiket dan perhitungan tarif penerbangan, menerapkan pengelolaan perjalanan wisata, menerapkan peranan *tour guiding/*kepemanduan wisata, menerapkan layanan *reception/front desk (pelayanan check in & check out)*, menerapkan pelayanan pemesanan kamar/*reservation service*, menerapkan layanan *housekeeping*, menerapkan pelayanan *F&B service*, menerapkan pelayanan *F&B product*.
4. Keterampilan Umum: Melakukan pekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; Melaksanakan tugas profesional guru sesuai tuntutan peraturan perundangan bidang pendidikan dan kode etik guru Indonesia yang berlaku; Meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; Melakukan kerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya; Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; Mengomunikasikan pemikiran/ argumen atau karya inovasi yang bermanfaat sebagai pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya; Mengevaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya

sendiri dan oleh sejawat; Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya; Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya; Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya serta Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.

PPG Pariwisata yang diselenggarakan UPI tahun 2017, mempunyai struktur sebagai berikut:

Pendalaman Materi-1 : Konsep Dasar Kepariwisata, yang terdiri dari mata kuliah:

- 1) Dasar-dasar Kepariwisata
- 2) K3 dalam Industri Pariwisata
- 3) Komunikasi Efektif dan literasi Pariwisata
- 4) MICE

Pendalaman Materi-2 : Usaha Perjalanan Wisata, terdiri dari mata kuliah:

- 1) Dokumen Usaha Perjalanan Wisata (UPW)
- 2) Pemesanan Tiket
- 3) Perhitungan tarif penerbangan
- 4) Pengelolaan Perjalanan Wisata
- 5) Tour Guide

Pendalaman Materi-3 : Akomodasi Perhotelan terdiri dari mata kuliah:

- 1) *Reception*
- 2) *Reservasi*
- 3) *Housekeeping*
- 4) *F&B Product*
- 5) *F&B Service*

Sebagaimana disyaratkan dalam program PPG umumnya, pelaksanaan PPG Pariwisata juga mengacu kepada pelaksanaan Secara umum model kurikulum Program PPG dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Model Kurikulum Program PPG

No	Isi Kurikulum	Proporsi
1	Pemantapan akademik pedagogik atau bidang studi dan keprofesian; dan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan rencana penelitian tindakan	60%
2	Praktik Pengalaman Lapangan	40%

Sumber: Dokumen Kurikulum PPG UPI

Model ini selanjutnya akan dikembangkan ke dalam struktur kurikulum yang disesuaikan dengan luaran lulusan Program Studi PPG oleh LPTK penyelenggara Program Studi PPG, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 35 dan 36. Kurikulum Program Studi Program Pendidikan Profesi Guru dibagi ke dalam dua semester yang berisikan materi-materi pembelajar akademik dan non akademik. Pada semester pertama materi-materi yang diajarkan di antaranya lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, *peer-teaching*, presentasi hasil pengembangan perangkat pembelajaran, serta pendalaman atau penguatan materi bidang studi/keahlian. Sedangkan pada semester kedua pembelajaran dititikberatkan pada kegiatan teknis di antaranya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan bagi PPG kejuruan ada kegiatan praktik di industri (Panduan Penyelenggaraan PPG, 2017). Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi dapat ditempuh dengan syarat telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan pada seluruh aspek pembelajaran dan penilaian baik dari segi sikap, pengetahuan maupun keterampilan.

Rancangan model kurikulum tersebut mendukung upaya untuk mempertahankan profesionalisme guru sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru di mana guru harus memiliki sertifikat pendidik sebagai tanda profesionalitasnya. Profesionalitas seorang guru dapat mempengaruhi kinerja dari guru tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh Zulfitri et al (2019) berkaitan dengan profesionalisme guru, di mana guru dikatakan profesional ketika menguasai kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional sebagai pendidik (Darmadi, 2015).

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata mempunyai hambatan dan menjadi peluang untuk disikapi. Pembangunan tidak terlepas dari peran guru yang profesional. Membentuk guru yang profesional dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang dilaksanakan setelah pendidikan sarjana S1 maupun D4. Hal ini juga untuk menjawab tantangan permasalahan guru. Keberhasilan PPG dipengaruhi oleh kurikulum yang disusun, yang menjadi acuan keberhasilan PPG. Kurikulum PPG Pariwisata berisi kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum.

CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini dan menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M. (2017). *The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483381411>
- Darmadi, H. (2015). Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 161–174. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31571/edukasi.v13i2.113>
- Gumelar, G. (2017, October 19). Kemenpar Klaim Pariwisata Jadi Kontributor Utama Devisa. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171018180443-78-249279/kemenpar-klaim-pariwisata-jadi-kontributor-utama-devisa>
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia* (pp. 1–10). (2016). <https://kemdikbud.go.id/main/files/download/e451d9ec3a04121>
- Panduan Penyelenggaraan PPG, (2017).
- Kisrianto, A. G., & Iriani, C. (2018). Persepsi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Sejarah Terhadap Program PPG. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1), 66–83. <https://doi.org/10.21009/jps.071.05>
- Lase, F. (2016). Kompetensi Kepribadian Guru Profesional. *Jurnal PPKn Dan Hukum*, 11(1), 36–66. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article>
- Ningrum, E. (2012). Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). *Jurnal Geografi Gea*, 12(2), 49–55. <https://doi.org/10.17509/gea.v12i2.1783>
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2014). *Curriculum: foundation, principles, and issues*. Pearson Education Limited.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, 31 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51474/pp-no-19-tahun-2017>
- Prodjo, W. A. (2016, October 27). Kembangkan Pariwisata, Ini Hambatan dan Tantangan Kemenpar. *Kompas*. <https://travel.kompas.com/read/2016/10/27/084100327/kembangkan.pariwisata.ini.hambatan.dan.tantangan.kemenpar>
- Silabus Mata Kegiatan PPG Pariwisata UPI*, (2017) (testimony of Program PPG Pariwisata UPI).
- Salim, A. (2016, August 21). Presiden Jokowi: Sektor pariwisata terbanyak serap tenaga kerja. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/579848/presiden-jokowi-sektor-pariwisata-terbanyak-serap-tenaga-kerja>
- Seftiawan, D. (2017, August 14). Indonesia Masih Butuh Hampir 70 Ribu Guru SMK. *Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01284564/indonesia-masih-butuh-hampir-70-ribu-guru-smk-407356>
- Setiawan, Y. (2017). *Menaruh Asa pada SMK Pariwisata*. <https://smk.kemdikbud.go.id/konten/2633/menaruh-asa-pada-smk-pariwisata>
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Pengembangan Kurikulum: teori dan praktik*. Rosdakarya.
- Supriana, I. W., & Sukmana, I. T. (2018). Peningkatan dan Pengembangan Pengajaran Berbasis Teknologi Bagi Guru-Guru di SMK Pariwisata Margarana. *Jurnal Widya Laksana*, 7(1), 47–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jwl.v7i1.12564>
- Syamra, Y. (2016). Pengaruh Kompensasi Finansial Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Pariwisata Di Kota Padang. *Economica*, 4(2), 266–276. <https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.628>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, 59 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 1 (2012). <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/02/05/undang-undang-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2012-tentang-pendidikan-tinggi/>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 54 (2005).
<https://ppg.kemdikbud.go.id/download/undang-undang-republik-indonesia-nomor-14-tahun-2005-tentang-guru-dan-dosen/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2003). <http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional>
- Warta Ekonomi. (2017, November 28). Ini Solusi Pemerintah untuk Atasi Kekurangan Guru. *Warta Ekonomi*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read162596/ini-solusi-pemerintah-untuk-atasi-kekurangan-guru.html>
- Zuhriyah, S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru Smk Negeri Kelompok Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 203. [https://doi.org/10.21927/literasi.2015.6\(2\).203-215](https://doi.org/10.21927/literasi.2015.6(2).203-215)
- Zulfitri, H., Setiawati, N. P., & Ismaini. (2019). Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. *LINGUA, Jurnal Bahasa & Sastra*, 19(2), 130–136. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/lingua/article/view/11095/0>